



PERSOALAN KONSEPTUAL DAN METODOLOGIS DALAM IDENTIFIKASI BAHASA DAN PENGELOMPOKANNYA: TANTANGAN BAGI PELINDUNGAN BAHASA DI INDONESIA

Mahsun

Universitas Mataram

mahsunirn@gmail.com

Abstrak: Linguistik sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan menemukan pijakan akademiknya pada penghujung abad ke-19. Kajian linguistik saat itu diwarnai oleh kajian yang bersifat diakronis (historis). Dalam perkembangan selanjutnya, kajian linguistik yang bersifat diakronis itu menjelma menjadi sebuah bidang tersendiri dalam linguistik yang dikenal sebagai linguistik diakronis. Linguistik diakronis yang di dalamnya terdapat dua subbidang kajian yaitu kajian dialektologi diakronis dan Linguistik historis komparatif memiliki kontribusi dalam pemahaman tentang keberadaan isolek-isolek itu sebagai bahasa (-bahasa) dalam suatu wilayah serta hubungan genetik yang terdapat di antara bahasa-bahasa tersebut. Pemahaman tentang keberadaan suatu isolek sebagai bahasa dapat memberikan arah bagi upaya pemertahanan bahasa itu dari ancaman kepunahan sedangkan pemahaman relasi genetik antarbahasa-bahasa itu dapat memberi pemahaman tentang relasi genetik penutur-penutur bahasa yang berbeda. Namun, dinamika perkembangan penutur bahasa-bahasa yang berbeda tersebut mengakibatkan hubungan kebahasaan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain menjadi sulit dijejaki relasi historisnya. Tidak hanya itu, ketidakterseidannya kerangka konseptual dan metodologis yang memadai tentang identifikasi isolek sebagai bahasa dan dialek mengakibatkan penetapan strategi perlindungan bahasa, terutama melalui jalur pendidikan formal, mengalami kesulitan. Sehubungan dengan itu, makalah ini akan memfokuskan bahasannya pada masalah tantangan konseptual dan metodologis dalam identifikasi dan pengelompokan bagi upaya perlindungan bahasa.

Kata Kunci: linguistik diakronis, relasi genetik, isolek, konseptual, metodologis, pengelompokan, perlindungan

Pendahuluan

Kondisi bahasa daerah/lokal di seluruh dunia yang sebagian besar digunakan oleh minoritas masyarakat tergeser oleh bahasa-bahasa yang lebih universal, seperti bahasa Inggris dan bahasa resmi setiap negara. Hal ini menjadi indikator pula bahwa bahasa-bahasa daerah yang berkategori mayoritas tetapi minoritas pemakaiannya juga terancam kepunahan (Rachman, 2007). Wurm (2001), dalam *Atlas of the World's Languages in Danger of Disappearing*, menunjukkan fenomena bahwa di Sulawesi, misalnya dari 110 buah bahasa, 36 bahasa terancam punah, di Maluku ada 80 bahasa, 22 yang terancam punah dan 11 sudah punah, di Papua dari 271 bahasa, 56 bahasa terancam punah.



Kepunahan bahasa (termasuk sastra yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya) tidak hanya terkait dengan kepunahan budaya, tetapi juga terkait dengan kepunahan masyarakat. Keterkaitan kepunahan bahasa dengan kepunahan budaya, karena bahasa tidak hanya merupakan salah satu unsur kebudayaan tetapi sekaligus menjadi wadah dari kebudayaan itu sendiri. Artinya, karena dia menjadi wadah dari kebudayaan, maka bahasa merupakan salah satu jendela untuk menatap/memahami budaya yang dianut suatu masyarakat. Bahasa adalah refleksi dan identitas yang paling kokoh dan jelas dari sebuah kebudayaan.

Adapun kaitan dengan kepunahan masyarakat dapat dijelaskan berikut ini. Mutahhari (1992: 1) memberi batasan masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan (sistem nilai budaya), ideologi, dan tujuan tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama. Selanjutnya, Baqir Shadar (1992: 106-114) menyebutkan ada tiga unsur utama yang membentuk masyarakat yaitu manusia, bumi (alam semesta), dan relasi fungsional antara manusia dengan sesamanya dan relasi fungsional manusia dengan alam. Relasi fungsional inilah yang secara konseptual sama dengan yang dimaksudkan Mutahhari di atas sebagai seperangkat kepercayaan. Dengan kedua konsep masyarakat tersebut dapat dikatakan bahwa adanya sekelompok manusia yang hidup dalam satu kesatuan wilayah teritorial tertentu, belumlah cukup dikatakan sebagai satu masyarakat (bandingkan dengan Soekanto, 2001). Dalam hidup bersama itu terdapat nilai-nilai yang mengatur tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya tetapi juga nilai-nilai yang mengatur relasi fungsional baik antarsesama manusia maupun antarmanusia dengan alam yang menjadi tempat tinggalnya. Unsur ketiga, relasi fungsional antarmanusia dengan manusia, manusia dengan alam inilah yang sebenarnya memberi pemaknaan akan hakikat keberadaan sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah teritorial tersebut. Unsur inilah yang menjadi inti penanda keberadaan masyarakat. Lalu apa hubungannya dengan bahasa? Sebagai unsur dan wadah kebudayaan, maka bahasa akan dapat memberikan deskripsi tentang sistem budaya suatu masyarakat yang diwadahnya. Punahnya suatu bahasa, maka punahlah unsur wadah dan penanda keberadaan masyarakat tersebut. Dengan kata lain, punahnya bahasa identik dengan punahnya masyarakat.



Bagaimana kaitannya dengan punahnya bahasa daerah? Terminologi bahasa daerah secara sugestif merujuk pada konsep bahasa yang berada di Indonesia, selain bahasa kesatuan Indonesia, bahasa asing, dan bahasa Melayu (Alwi, 2000). Bahasa daerah dengan demikian, adalah bahasa yang dituturkan di wilayah administratif yang disebut sebagai daerah kabupaten/kota atau provinsi atau bahkan di wilayah kecamatan, desa atau perkampungan di Indonesia. Dalam satu daerah dapat saja terdapat satu atau lebih bahasa daerah, misalnya di Provinsi NTB terdapat sekurang-kurangnya 11 buah bahasa. Sebagai bahasa yang dituturkan oleh sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu teritorial tertentu, dengan sistem kepercayaan tertentu, maka hilangnya bahasa daerah tersebut identik dengan hilangnya unsur inti dari keberadaan suatu masyarakat. Dengan kata lain, punahnya bahasa daerah identik dengan punahnya masyarakat daerah itu, dalam hal ini masyarakat penutur bahasa tersebut.

Ada indikasi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam pendidikan formal membuat kedudukan bahasa daerah menjadi semakin lemah. Itu sebabnya, organisasi dunia (UNESCO), melakukan berbagai upaya demi mempertahankan eksistensi bahasa daerah yang sebagian besar menjadi bahasa ibu. Namun sejauh mana efektivitas upaya itu, kini tengah bersaing dengan arus modernisasi dan globalisasi yang setiap saat selalu mengancam eksistensi bahasa-bahasa daerah/ibu tersebut. Padahal, bahasa daerah/ibu merupakan bahasa pertama yang digunakan oleh manusia dalam mentransmisi nilai-nilai etika, estetika pada generasi penerusnya. Melalui bahasa itulah anak manusia dibentuk untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, hilangnya bahasa daerah/ibu berarti hilang salah satu media pembentukan diri manusia.

Dalam hubungan ini, Poedjosoedarmo (2003) menyatakan, bahwa mengendurnya nilai-nilai etika dalam tata pergaulan generasi muda Jawa bersamaan dengan mulai melemahnya penguasaan generasi muda pada sistem tingkat tutur bahasa Jawa. Pernyataan ini, jelas menggambarkan bagaimana peran strategis bahasa ibu (yang sebagian besar di Indonesia merupakan bahasa daerah) dalam membentuk kepribadian manusia Indonesia. Namun sayangnya, peran strategis bahasa daerah itu tidak didukung oleh upaya strategis melindungi eksistensi bahasa daerah (termasuk sastra yang didukung bahasa daerah) tersebut.



Memang berbagai upaya dalam bentuk penelitian bahasa dan sastra daerah sudah banyak dilakukan. Setidak-tidaknya, sampai tahun 2000, Pusat Bahasa telah melakukan penelitian sebanyak 874 judul untuk penelitian bahasa daerah; 341 judul untuk penelitian sastra daerah; dan 145 judul untuk penelitian bahasa dan sastra Melayu (Jumariam dkk., 2000). Dari jumlah itu, belum terhitung judul-judul penelitian (yang belum terdatakan) yang dilakukan kalangan perguruan tinggi baik oleh dosen maupun mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir untuk jenjang pendidikan S1, S2, dan S3, serta berbagai judul penelitian yang dilaksanakan para pakar mancanegara. Dilihat dari kenyataan itu, maka dapat dikatakan bahwa hampir semua bahasa daerah yang ada di Indonesia dan berbagai aspek kajiannya telah terjamah para peneliti. Ada banyak penelitian bahasa (sastra) daerah yang telah dilakukan, seperti penelitian aspek tertentu dari bahasa daerah tertentu, misalnya aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, bahkan kajian yang bersifat antardisiplin seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, linguistik historis komparatif, dialektologi dll. Wujudnya berupa laporan baik yang diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Namun, persoalannya, sudah cukupkah langkah semacam itu menjadi ihtiar yang mempunyai kekuatan bagi upaya pemertahanan bahasa dan sastra daerah? Penelitian yang wujud akhirnya berupa laporan penelitian tidaklah cukup dijadikan strategi perlindungan bahasa. Sudah cukupkah penelitian dalam rangka plindungan bahasa daerah itu sampai di situ? Kalau tidak, lalu untuk apa hasil penelitian itu? Jawabannya, ada dua kemungkinan. Pertama, bagi kegiatan yang tidak memiliki orientasi akhir yang bertujuan pragmatis, maka penelitian itu sudah dipandang cukup. Namun, bagi kegiatan yang memiliki orientasi akhir yang bersifat praktis, terutama yang terkait dengan perlindungan bahasa, maka kegiatan itu baru merupakan langkah awal, baru merupakan tahapan penyediaan pangkalan data (*data base*).

Dari kedua kondisi yang merupakan jawaban pertanyaan di atas, dapat dikatakan bahwa kecenderungan yang pertama lebih tampak dari semua kegiatan penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan daerah di Indonesia. Sebagai bukti, ketika selesai tahapan penelitian yang bersifat deskriptif terhadap salah satu aspek kebahasaan, misalnya sistem fonologi atau sistem morfologi atau sintaksis bahasa tertentu, lalu mau diapakan hasil penelitian tersebut? Sudahkah ada perencanaan



bahwa berdasarkan hasil kajian aspek kebahasaan itu ditindaklanjuti misalnya dengan kegiatan pengembangan hasil penelitian itu sebagai titik tolak standarisasi sistem tata tulis (ejaan) untuk penelitian fonologi dan standarisasi tata bahasa untuk penelitian sistem morfologi dan sintaksis, yang nantinya bermanfaat dalam rangka perlindungan bahasa melalui program pembelajaran bahasa dan sastra daerah. Bahkan kesemerautan alur/gerak penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan terlihat misalnya dalam penentuan masalah kebahasaan/kesastraan manakah yang lebih dasar untuk dilakukan pertama kali. Sebagai contoh, kegiatan pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia baru secara terencana digelar tahun 1990 oleh Pusat Bahasa, yang hasilnya untuk sementara telah dilaporkan dalam Kongres Bahasa ke-IX, 2008 yang lalu. Sementara, penelitian aspek kebahasaan tertentu dari bahasa daerah sudah dilaksanakan jauh sebelum digelar kegiatan penelitian pemetaan bahasa. Apa yang ironis dari perjalanan alur kegiatan ini, ialah bagaimana kita dapat mendeskripsikan aspek tertentu dari bahasa daerah tertentu, sementara kita sendiri belum mengetahui apakah isolek yang kita teliti aspek kebahasaan itu memang berstatus sebagai bahasa? Jangan-jangan bukan bahasa, tetapi hanya merupakan dialek dari sebuah bahasa. Kasus munculnya hasil penerbitan Pusat Bahasa (sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) yang berjudul *Morfologi Bahasa Kolo* (1995), jelas bertentangan dengan status isolek itu hanya sebagai variasi dialektal dari bahasa Mbojo, salah satu bahasa subrumpun Austronesia Tengah yang terdapat di NTB (periksa Mahsun, 2006).

Kesemerautan alur pergerakan penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan daerah di Indonesia disebabkan kecenderungan belum terkoordinasi secara sinergis antara satu instansi dengan instansi lain yang terkait dengan masalah penanganan bahasa dan sastra. Kurangnya koordinasi yang bersifat sinergis itu berawal dari ketidakjelasan arah penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan daerah yang hendak dituju. Bandingkan misalnya, perbedaan cakupan kerja antara yang dilakukan Badan Bahasa bersama Balai/Kantornya dengan yang dilakukan perguruan tinggi, atau jangan-jangan beberapa penelitian yang dilakukan Badan Bahasa termasuk Balai/Kantornya sama dengan yang dilakukan para dosen atau mahasiswa di perguruan tinggi yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Apabila hal ini tidak segera diatasi maka kekhawatiran akan terwujudnya



kecenderungan semakin banyak jumlah bahasa daerah yang oleh Krauss (1992) disebut sebagai bahasa yang berkategori *moribund* dan *endangered*¹⁾, menjadi kenyataan. Dalam pada itu, bahasa daerah akan menghilang dari rentangan perbendaharaan bahasa rakyat Indonesia (Soedarmo, 2003). Sejalan dengan itu pula, akan turut menghilang berbagai nilai-nilai/kearifan lokal yang terekam dalam bahasa-bahasa daerah itu. Untuk itu, diperlukan suatu strategi terpadu dalam upaya melindungi bahasa dan sastra daerah dari ancaman kepunahan.

Pendidikan sebagai Jalur Pelindungan Bahasa Daerah dari Ancaman Kepunahan

Dlam rangka pelindungan bahasa daerah/local dari ancaman kepunahan, Pendidikan formal merupakan jalur yang lebih terencana, terarah, dan terukur. Ada dua strategi yang dapat dilakukan, yaitu menjadikan bahasa daerah/local sebagai bahasa pengantar pendidikan atau menjadikan bahasa tersebut sebagai materi pembelajaran muatan lokal. Kedua strategi itu memiliki persoalan tidak hanya yang terkait dengan masalah konseptual, metodologis, tetapi juga terkait dengan masalah dalam menjadikan bahasa itu baik sebagai bahasa pengantar Pendidikan maupun sebagai materi muatan local

Beberapa Persoalan Terkait Konsep Bahasa, Bahasa Ibu, dan bahasa Daerah

Mahsun (2008) membedakan antara konsep bahasa ibu dengan konsep bahasa daerah. Dari sudut pandang linguistik, ketika sebuah atau sekelompok isolek dikategorikan sebagai bahasa, maka pada saat itu penerapan suatu parameter tertentu diberlakukan. Oleh karena itu, bahasa ialah isolek(-solek) yang berdasarkan parameter tertentu memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai bahasa. Parameter tertentu itu dapat berupa parameter kuantitatif dan dapat berupa parameter kualitatif. Parameter kuantitatif, di dalamnya dapat berupa dialektometri atau leksikostatistik, sedangkan parameter kualitatif dapat berupa parameter pemahaman timbal balik (bandingkan dengan Mahsun, 1995; 2005; dan 2007). Dari sudut pandang dialektometri, bahasa adalah isolek(-isolek) yang memiliki persentase perbedaan dengan isolek(-isolek) lainnya berkisar antara 81 – 100%,



sedangkan dari sudut pandang leksikostatistik, bahasa adalah isolek(-isolek) yang satu sama lain memiliki persamaan (kata berkerabat) berkisar antara 81 – 100%. Adapun dari sudut pandang pemahaman timbal balik, bahasa adalah isolek-isolek yang apabila di antara penutur isolek-isolek yang berbeda itu melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan isolek masing-masing maka di antara mereka masih terdapat pemahaman timbal balik.

Ketiga parameter dalam penentuan status isolek(-isolek) sebagai bahasa di atas memiliki kadar kerincian deskripsi yang berbeda. Apabila pengertian bahasa dari sudut pandang leksikostatistik belum mencerminkan secara eksplisit adanya gradasi varian-varian dalam satu bahasa, maka dalam pengertian bahasa berdasarkan sudut pandang dialektometri justru gradasi varian dalam bahasa itu diperlihatkan secara tegas. Untuk menjelaskan hal ini dapat dilihat tabel berikut ini.

LEKSIKOSTATISTIK		DIALEKTOMETRI	
Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
81-100%	Bahasa (<i>language</i>)	81-100%	Beda bahasa
37-80%	Keluarga (<i>family</i>)	51-80%	Beda dialek
12-36%	Rumpun (<i>stock</i>)	31-50%	Beda subdialek
4-11%	Mikrofilum	21-30%	Beda wicara
1-3%	Mesofilum	20 ke bawah	Tidak ada perbedaan
1% ke bawah	Makrofilum	-	-

Berdasarkan persentase pengkategorisasian dalam leksikostatistik di atas terlihat bahwa jangkauan terendah adalah bahasa (*language*) dan tertinggi adalah makrofilum. Artinya, level di bawah bahasa, seperti level dialek, subdialek dan seterusnya tidak menjadi bahan perbincangan leksikostatistik. Sebaliknya pengkategorisasian dengan dialektometri, terlihat dengan jelas adanya varian-varian di dalam bahasa, yang dimulai dari level tertinggi: bahasa yang berbeda, diikuti level beda dialek, beda subdialek, beda wicara dan terendah: level tanpa perbedaan. Meskipun dalam dialektologi itu dibicarakan level perbedaan bahasa, namun relasi antarbahasa yang berbeda tidaklah menjadi perbincangan. Apakah dua bahasa atau lebih yang dikatakan berbeda secara dialektometri itu memiliki relasi kekerabatan pada tataran tertentu (keluarga, rumpun, mikrofilum dan seterusnya) tidak menjadi urusan dialektometri, melainkan menjadi urusan leksikostatistik. Sebaliknya, leksikostatistik tidak pernah berurusan dengan pengelompokan isolek



di bawah level bahasa, seperti pengelompokan dialek atau subdialek dan seterusnya. Hal ini menjadi tanggung jawab dialektometri. Itu sebabnya pula, penggunaan metode leksikostatistik untuk kajian dialek merupakan suatu kekeliruan yang fatal.

Hal yang sama dengan pengkategorisasian bahasa berdasarkan leksikostatistik, adalah pengkategorisasian berdasarkan pemahaman timbal balik. Dalam pengkategorisasian bahasa berdasarkan parameter pemahaman timbal balik, tidak ada gradasi yang eksplisit ihwal varian dalam suatu bahasa. Namun demikian, baik pengkategorisasian berdasarkan parameter leksikostatistik, dialektometri, maupun pemahaman timbal balik, semuanya memandang bahwa bahasa adalah suatu entitas yang tidak bersifat homogin.

Berdasarkan karakteristik bahasa sebagai suatu entitas yang tidak bersifat homogin tersebut, lalu bagaimanakah halnya dengan konsep bahasa dalam konstruksi “bahasa daerah” dan “bahasa ibu”? Kedua istilah ini sering dikacaukan. Istilah bahasa ibu digunakan untuk merujuk pada bahasa daerah (periksa Hanafi, 2005). Padahal dalam istilah “bahasa daerah” konsep bahasa sebagai suatu entitas yang tidak homogin tetap dipertahankan. Bahasa daerah digunakan untuk merujuk bahasa-bahasa yang terdapat di wilayah Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahasa ini digunakan sebagai identitas etnis-etnis yang ada di Indonesia. Dalam bahasa etnis tersebut terdapat varian-varian, baik yang bersifat dialektal maupun sosiodialektal. Oleh karena itu, maka bahasa daerah mengandung pengertian sebagai salah satu varian dalam bahasa yang digunakan oleh etnis tertentu, yang norma kebahasaannya dijadikan sebagai acuan dalam berbahasa secara baik dan benar. Dalam konsep ini, terkandung adanya proses alamiah (atau dapat juga bersifat rekayasa) yang berlangsung dalam masyarakat untuk memilih varian tertentu dalam bahasa itu yang dipandang dapat menjadi representasi bagi sarana komunikasi dan penentu identitas etnis tersebut. Artinya di sini, ada proses standardisasi baik itu standardisasi bahasa maupun standardisasi aspek kebahasaannya.

Berbeda halnya dengan konsep bahasa dalam konstruksi “bahasa ibu”. Dalam konstruksi bahasa ibu, konsep bahasa tidaklah merujuk pada varian standar seperti dalam konsep bahasa dalam konstruksi bahasa daerah. Bahasa ibu merujuk



pada sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau keluarga yang memelihara seorang anak (lihat Chaer, 2004: 81). Oleh karena itu, bahasa ibu merujuk pada varian setempat dalam suatu bahasa yang digunakan sebagai bahasa pertama di dalam mendidik anak manusia dalam keluarga. Apabila dikatakan bahwa jika seorang anak memiliki bahasa ibu bahasa daerah, maka yang dimaksudkan di situ adalah salah satu varian yang terdapat dalam bahasa daerah itu yang digunakan oleh keluarga tersebut untuk mendidik anak-anaknya untuk pertama kali.

Berangkat dari konsep bahasa ibu di atas, maka bahasa ibu seorang anak Indonesia dapat berupa bahasa/varian tertentu dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Namun, sebagian besar anak Indonesia menggunakan bahasa ibu adalah bahasa/varian bahasa daerah. Persoalannya sekarang, jika bahasa daerah merupakan bahasa yang sebagian besar menjadi bahasa ibu anak Indonesia, maka bagaimanakah prospeknya jika bahasa itu dijadikan bahasa pengantar dalam pendidikan di Indonesia?

Beberapa Persoalan Menjadikan Bahasa Ibu sebagai Bahasa Pengantar Pendidikan

Ada beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan jika bahasa ibu yang berupa bahasa daerah dijadikan sebagai bahasa pengantar di dalam pendidikan formal, yaitu pertama, terkait dengan situasi kebahasaan di Indonesia, kedua terkait dengan daya ungkap bahasa itu dalam pengembangan Iptek, dan ketiga kondisi heterogenitas Siswa. Ketiga hal tersebut berikut ini akan dibicarakan satu per satu.

Situasi Kebahasaan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahasa daerah. Badan Bahasa mengidentifikasi terdapat 659 bahasa da daerah di Indonesia. Dari jumlah itu belum terhitung variasi dialektal yang terdapat dalam bahasa tersebut. Apabila setiap bahasa diambil rata-rata memiliki tiga buah variasi dialektal, maka kita akan memperoleh angka di atas seribu variasi dialektal. Situasi kebahasaan yang demikian ini tentunya akan memunculkan persoalan tersendiri bagi upaya menjadikan bahasa ibu bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan



formal. Persoalan-persoalan dimaksud terkait dengan penyediaan tenaga pengajar dan penyediaan bahan pembelajaran.

Dengan diterapkannya otonomi daerah pada daerah kabupaten/kota maka dalam rangka menjadikan bahasa ibu bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pendidikan pemerintah daerah dituntut menyiapkan tenaga pengajar dan bahan pembelajarannya. Menyiapkan tenaga pengajar yang menguasai variasi dialektal setempat tentu merupakan pekerjaan tersendiri yang tidak kalah beratnya. Apabila dalam menyiapkan tenaga pengajar untuk pelajaran mulok bahasa daerah saja sudah cukup sulit apalagi menyiapkan guru yang menguasai varian setempat untuk mengajar berbagai mata pelajaran pada kelas-kelas permulaan. Kondisi itu semakin tidak ditunjang oleh kenyataan, sangat jarang penutur suatu varian yang menjadi guru di tempat penutur varian tersebut. Bahkan banyak tenaga pengajar yang berlatar belakang bahasa ibu yang tidak sama dengan dengan bahasa ibu siswanya. Itu artinya, pemerintah paling tidak akan melakukan pelatihan kebahasaan bagi para guru agar menguasai bahasa/varian setempat.

Terkait dengan persoalan penyediaan bahan pembelajaran pada kesempatan ini akan dikemukakan pengalaman pemerintah Provinsi NTB sebagai ilustrasi yang menarik untuk didiskusikan. Dalam rangka melestarikan bahasa daerah di wilayah NTB, pemerintah provinsi meluncurkan dua program unggulan, yaitu Program pembelajaran bahasa daerah sebagai materi muatan lokal untuk tingkat TK dan SD dan program uji coba pembelajaran dengan menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar di tingkat SD. Program yang pertama dilaksanakan oleh Mahsun dkk. dari tahun 2005 s.d. 2008, dengan produk berupa buku materi pembelajaran bahasa Sasak, Samawa, Mbojo untuk TK dan SD, buku petunjuk pembelajaran, Silabus, dan Draf Rancangan Perda tentang Mulok. Adapun program kedua dilaksanakan oleh Mu'adz dkk. mulai 2006 s.d. 2008 dengan berfokus pada uji coba pembelajaran menggunakan bahasa ibu bahasa Sasak dalam pembelajaran pada tingkat permulaan SD di Pulau Lombok. Salah satu produk yang dihasilkan dari kegiatan itu ialah penyediaan materi pembelajaran di SD kelas permulaan berupa terjemahan buku ajar yang berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Sasak varian setempat. Ada beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan, yang terkait dengan judul makalah ini, yaitu produk kegiatan pembelajaran dengan



menggunakan bahasa ibu bahasa sasak sebagai bahasa pengantar yang berupa terjemahan buku ajar berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Sasak.

Dalam penerjemahan, yang pertama-tama harus disiasati adalah persoalan tata tulis. Ketidajelasan sistem ejaan yang digunakan mengakibatkan dua bentuk yang dari segi fonetis dan semantis berbeda ditulis dengan cara yang sama, padahal kondisi ini berakibat fatal bagi pembelajaran bahasa tulis, misalnya untuk kata yang bermakna tempat pemukiman (salah satu tempat di Lombok Barat) dan tempat perbaikan kendaraan ditulis dengan cara yang sama: *bengkel*. Belum lagi dipikirkan bahwa untuk sampai pada penetapan lambang bunyi (huruf) dalam sistem ejaan bahasa Sasak itu diperlukan riset yang mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa yang terdapat dalam varian bahasa tersebut. Baru setelah itu dapatlah ditentukan lambang-lambang yang dipilih untuk merepresentasikan bunyi-bunyi dalam satu sistem tata tulis/ejaan.

Hal lain yang muncul sehubungan dengan kegiatan terjemahan sebagai salah satu produk riset di atas, ialah dari segi kemanfaatan produk itu sendiri. Buku teks pelajaran yang diterjemahkan itu akan digunakan untuk siapa? Apabila dilihat dari asal materinya yang berupa buku teks pegangan siswa, maka dapat dikatakan bahwa buku terjemahan itu dihiatkan untuk menjadi pegangan siswa. Kalau ini yang dimaksudkan, maka keberadaan buku teks itu sungguh sia-sia. Mana mungkin siswa yang berlatar belakang bahasa ibu bahasa Sasak yang hanya menguasai bahasa ibunya ragam lisan, belum menguasai ragam tulis akan mampu membaca materi yang bertuliskan aksara dalam bahasa itu, karena mereka baru mengenal bahasa tulis ketika mereka mulai masuk ke sekolah melalui pelajaran mulok bahasa dan sastra Sasak. Sangat ironis, siswa yang belum memahami sistem perangkaian huruf-huruf bahasa Sasak, tiba-tiba harus membaca lambang bunyi yang berkombinasi secara kompleks dalam satu kata bahasa itu. Namun, sebaliknya jika materi yang diterjemahkan itu dihajatkan bukan untuk siswa, meskipun materi dalam bahasa Indonesianya berasal dari materi untuk siswa, bukan lalu akan terhindar dari kesulitan metodologis (metode pembelajaran). Persoalannya, jika salah satu bagian dari metode pembelajaran itu adalah evaluasi hasil pembelajaran, maka kesulitan yang akan ditemui terkait dengan upaya pengembangan alat evaluasi hasil pembelajaran. Bagaimana mengembangkan alat evaluasi berupa tes



tertulis, sementara siswa belum menguasai bahasa Sasak ragam tulis. Artinya, evaluasi dilakukan secara lisan. Bayangkan jika setiap evaluasi selalu dilakukan secara lisan.

Persoalan berikut yang terkait dengan kemanfaatan materi pembelajaran itu adalah diterjemahkannya materi itu dalam versi bilingual. Sebelah kiri menggunakan bahasa Sasak dan di sebelah kanan menggunakan bahasa Indonesia. Persoalannya, untuk apa teks bahasa Indonesianya bagi siswa? Bukankah penggunaan bahasa Ibu dimaksudkan oleh peneliti sebagai penggunaan satu-satunya bahasa pengantar, yaitu bahasa yang menjadi bahasa ibu siswa? Jadi, bersifat monolingual. Masih ada sederet persoalan lain yang mengikuti strategi pembelajaran yang berwujud produk terjemahan, misalnya menyangkut izin dari penulis dan penerbit, yang bukunya dialihbahasakan ke bahasa ibu siswa.

Berdasarkan uraian di atas, kita lalu dapat bertanya dalam bentuk apakah materi pembelajaran dengan menggunakan bahasa ibu bahasa/varian dalam bahasa daerah?

Daya Ungkap Bahasa Ibu dalam Pengembangan Iptek

Ada yang menarik dari hasil penyediaan bahan pembelajaran yang dilakukan melalui uji coba pembelajaran dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa ibu di atas, ialah masih banyak istilah keilmuan dalam bidang-bidang pelajaran tertentu yang tidak memiliki padanannya dalam bahasa ibu. Banyak istilah, misalnya dalam matematika yang tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Sasak, sehingga untuk istilah pembagian, pengurangan, pengalihan, penambahan, sudut, siku-siku dll. diserap menjadi bagian dari bahasa Sasak. Jika terlampaui banyak istilah teknis keilmuan yang tidak ada padanannya maka dalam buku pembelajaran mengandung banyak istilah yang juga kurang dikenal siswa. Akibatnya. Siswa belajar lagi bahasa lain. Dalam pada itu, ihtiar menjadikan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan menjadi kurang efektif. Maunya membebaskan siswa agar tidak lagi berkutat dengan persoalan pemahaman bahasa pengantar tetapi langsung berkutat dengan pemahaman substansi materi pembelajaran, tahu-tahunya siswa juga masih belum bebas sepenuhnya dari upaya menguasai bahasa pengatarnya lebih dahulu. Keterbatasan daya ungkap yang



menyangkut Iptek dalam bahasa Sasak ini diduga juga terjadi pada bahasa-bahasa daerah lainnya. Tentunya, kenyataan ini menjadi tantangan tersendiri bagi ihtiar menjadikan bahasa ibu yang berupa bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pendidikan di Indonesia.

Heterogenitas Siswa

Pembauran sosial akibat dari keterbukaan dan mobilitas etnis di Indonesia yang begitu tinggi mengakibatkan dalam satu wilayah didiami oleh berbagai etnis atau subetnis yang berbeda. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut ialah tidak mengherankan jika dalam satu kelas pada pendidikan formal diisi oleh siswa-siswa dengan latar belakang bahasa ibu yang berbeda. Paling tidak berasal dari bahasa ibu yang berupa varian (dialek) yang berbeda. Peroalannya, si guru akan menggunakan bahasa ibu bahasa daerah atau dialek yang mana dalam menyampaikan materi pembelajarannya? Pertimbangan ini sangat penting, mengingat bahwa meskipun siswa itu masih dalam bahasa yang sama, hanya beda dialek, namun perbedaan dialek itu di atas 50%, maka sulit dibayangkan siswa yang masih seusia itu sudah dapat memahami variasi-viasi dialektal yang terdapat dalam bahasa daerahnya. Artinya, belajar dialek lain meskipun masih satu bahasa dengan bahasanya sama dengan belajar bahasa lain.

Beberapa Persoalan dalam Menjadikan Bahasa Daerah sebagai Materi Mulok

Dalam rumusan politik bahasa nasional itu ditentukan fungsi bahasa daerah sebagai: (a) lambang kebanggaan daerah, (b) lambang identitas daerah, (c) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (d) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, (e) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Selain itu, dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai: (a) pendukung bahasa nasional, (b) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (c) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia, serta (d) dalam keadaan tertentu dapat berfungsi sebagai pelengkap bahasa Inonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah (Alwi dan Dendy Soegono, 2000).



Rumusan fungsi bahasa daerah dalam hubungan bahasa tersebut dengan bahasa Indonesia pada butir kedua, mengandung pengertian bahwa dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak diperkenankan menggunakan bahasa daerah, kecuali pada daerah-daerah tertentu karena faktor-faktor tertentu, misalnya daerah itu belum terjangkau sarana komunikasi seperti radio, televisi dsb. sehingga sebagian besar penuturnya hanya mengenal bahasa daerah setempat. Kebijakan ini secara psikologis telah membentuk persepsi peserta didik akan kurang pentingnya bahasa dan kultur yang mereka miliki yang terekam dalam bahasa ibu mereka. Di samping itu, secara tidak langsung dapat membentuk pola berpikir negatif penutur bahasa daerah terhadap bahasa ibunya dan sekaligus akan mengurangi kebanggaan mereka terhadap bahasa dan kulturnya. Dalam pada itu, keadaan di atas jelas tidak mendukung berbagai upaya yang telah dicanangkan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran bahasa daerah seperti yang dirumuskan dalam kebijakan Politik Bahasa Nasional tersebut. Lebih jauh dari itu, kekhawatiran akan terwujudnya kecenderungan semakin banyak jumlah bahasa daerah yang oleh Krauss (1992) disebut sebagai bahasa yang berkategori *moribund* dan *endangered* akan menjadi kenyataan. Dalam pada itu, bahasa daerah akan menghilang dari rentangan perbendaharaan bahasa rakyat Indonesia (Soedarmo, 2003), yang sejalan dengan itu, akan turut menghilang pula berbagai nilai-nilai/ keraifan lokal yang terekam dalam bahasa-bahasa daerah itu. Kondisi ini di samping diperkuat oleh konsentrasi pembinaan bahasa yang dilakukan oleh Pusat Bahasa yang cenderung lebih berat pada pembinaan bahasa Indonesia (periksa Sudaryanto, 1991), juga disebabkan oleh sikap penutur bahasa daerah yang kurang positif terhadap bahasa daerahnya. Sikap ini di samping disebabkan penutur bahasa daerah (sebagian besar bahasa daerah yang ada di Indonesia) itu relatif kecil jumlahnya, dan karena itu memandang dirinya sebagai kelompok minoritas yang kurang berprestise, juga semakin dominannya pemakaian bahasa nasional (BI) dalam berbagai aspek kehidupan (bandingkan dengan Mu'adz, 1998).

Berdasarkan pandangan di atas itulah banyak sekolah di dunia menjadikan bahasa lokal sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan. Namun sebenarnya, pembelajaran bahasa daerah tidak hanya sebagai bahasa pengantar di tingkat permulaan tetapi bahasa daerah haruslah menjadi salah satu materi pengajaran



dalam muatan lokal dari tingkat permulaan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Urgensi dari gagasan itu adalah, pertama, bahwa pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah (termasuk perguruan tinggi), akan semakin memberi legitimasi bagi upaya pemeliharaan bahasa daerah yang secara yuridis formal memang dijamin UDD 1945. Langkah ini akan menjadi salah satu tindakan (preventif) dalam upaya mencegah bahasa daerah dari ancaman kepunahan. Kedua, bahwa dengan dijadikannya bahasa daerah sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah, maka akan semakin menggairahkan peserta didik dalam belajar sejarah dan budaya lokal. Ketiga, bahwa dengan belajar bahasa daerah (tentunya dengan model pengembangan materi muatan lokal bahasa daerah yang berdimensi kebhinnekaan, seperti yang dikembangkan Mahsun (2000) melalui Proyek Riset Unggulan Terpadu V, sejak 1997/1998 sampai 1999/2000 akan dapat memberi pemahaman secara empirik akan makna keanekaragaman dalam ketunggalikaan suku bangsa-suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Suatu pemahaman yang selama ini dapat dipandang sebagai pemahaman yang bersifat verbalistik atau semu, yang dikondisikan secara indoktrinatif tanpa diberi kesempatan untuk memikirkan kebenarannya melalui uji-uji empirik.

Lalu persoalannya, sudah siapkah bangsa Indonesia menjadikan bahasa daerah untuk tujuan di atas, dilihat dari jumlah bahasa daerah yang hidup dan berkembang di wilayah ini cukup besar? Anton Moeliono (1985) mencatat hanya enam bahasa besar, yaitu Jawa, Sunda, Madura, Batak, Bali, dan Aceh yang selama ini menjadi bahasa pengantar di tingkat awal sekolah dasar.

Secara teoretis, masalah pembelajaran bahasa baik itu bahasa nasional, daerah, ataupun bahasa asing akan selalu berkuat dengan persoalan bahasa standar. Hal ini penting karena untuk mengukur capaian keberhasilan dalam proses pembelajarannya haruslah didasarkan pada satu kriteria penilaian yang baku atau standar. Oleh karena itu, penentuan standar evaluasi capaian hasil belajar tentunya akan berpedoman pada satu kerangka acuan berbahasa secara baik dan benar, dan itulah yang disebut bahasa standar.

Standardisasi bahasa tentu tidak hanya menyangkut standardisasi bahasa itu sendiri, tetapi juga menyangkut standardisasi aspek-aspek kebahasaan dari bahasa tersebut. Menyangkut standardisasi bahasa, dimaksudkan bahwa dalam suatu



bahasa, apakah itu bahasa nasional, bahasa asing, atau bahasa daerah, dalam praktik pemakaiannya, tidak pernah hadir dalam suatu sosok yang homogen. Ia hadir dalam berbagai varian, baik itu berupa variasi social maupun variasi dialectal (geografis). Oleh karena itu, untuk penentuan bahasa standar dari bahasa itu haruslah dilakukan kajian secara sosiolinguistik dan melakukan musyawarah penentuan bahasa standar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan/*stakeholders* dengan bertumpu pada hasil kajian secara sosiolinguistik tersebut. Dalam pada itu, penentuan varian tertentu sebagai representasi dalam berbahasa secara baik dan benar pada bahasa itu haruslah didahului oleh suatu kajian yang komprehensif tentang jumlah varian, jumlah penutur serta daerah sebaran geografis dari penggunaan varian-varian tersebut.

Adapun yang menyangkut standarisasi aspek tertentu dari suatu bahasa, maksudnya adalah upaya kodifikasi aspek-aspek kebahasaan seperti standarisasi aspek ejaan (tatatulis), tatabahasa dan lainnya. Standarisasi dalam pengertian yang terakhir ini, tentu akan memanfaatkan hasil kajian linguistik teoretis, seperti hasil kajian fonologi untuk dasar penentuan standarisasi ejaan, hasil kajian bidang morfologi dan sintaksis untuk standarisasi tatabahasa.

Selanjutnya, oleh karena dalam pembelajaran bahasa tercakup pula pembelajaran kesastraan, maka diperlukan pula bahan-bahan yang menyangkut kesastraan. Dalam hal ini, informasi yang menyangkut bentuk, jenis, sikap masyarakat pendukung, kapan karya itu digunakan, serta kira-kira berapa jumlah peminat dan pencipta sastra yang masih hidup dalam komunitas tutur bahasa tertentu, yang akan dijadikan bahan materi pengajaran tersebut. Dalam hubungan ini, maka kajian yang menyangkut persoalan distribusi bentuk dan jenis karya sastra yang masih tumbuh dan berkembang pada masyarakat tutur yang menjadi objek pengembangan materi muatan local ini haruslah dilakukan secara komprehensif. Selain itu, kajian sastra harus pula di arahkan pada kebutuhan dalam mendesain materi pengajaran yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang ingin dikaji dalam studi ini. Dalam hal ini, harus tergambar misalnya bentuk dan jenis sastra yang relevan bagi materi untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Perbedaan itu tidak hanya menyangkut bentuk dan jenis tetapi juga menyangkut isi. Atas dasar itulah nantinya akan dilakukan seleksi materi kebahasaan dan kesastraan



yang akan dijadikan bahan pada lokakarya pengembangan Garis-garis Besar Program pembelajaran dan pengembangan materi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan tempat materi itu akan diajarkan. Dan pada akhirnya, materi yang tersusun itu haruslah diuji coba tentang kelayakannya, kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran, mengevaluasi pelaksanaannya, serta membuat rekomendasi. Tentunya, kegiatan ini haruslah diawali dengan kegiatan pelatihan calon guru yang akan memblajarkan materi yang akan diujicobakan itu. Hasil dari uji coba tersebut di samping akan berimplikasi pada penataan dan perapian kembali materi pembelajaran, juga akan dimanfaatkan dalam pelatihan guru dan perapian GBPP, sehingga diperoleh sebuah GBPP materi pembelajaran Bahasa dan Sastra dalam bahasa tersebut yang lebih representatif.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka pengembangan materi pembelajaran bahasa dan sastra daerah sebagai materi muatan local harus ditujukan untuk memecahkan persoalan berikut ini.

A. Seleksi Bahan dalam Rangka Pengembangan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), dengan berbagai kegiatan yang bertujuan memecahkan masalah:

- a. penentuan jumlah varian dan daerah sebaran ketiga bahasa itu;
- b. penentuan jenis dan bentuk hasil cipta sastra pada ketiga penutur bahasa itu;
- c. penentuan salah satu varian dalam masing-masing bahasa itu sebagai acuan dalam berbahasa secara baik dan benar (bahasa standar);
- d. standardisasi aspek ejaan dan tatabahasa dalam ketiga bahasa itu;
- e. pengembangan Garis-garis Besar Program Pengajaran untuk ketiga bahasa itu melalui kegiatan lokakarya pengembangan GBPP;

B. Pengembangan Bahan Pengajaran dan Aplikasinya dalam Proses Pembelajaran, dengan kegiatan yang ditujukan pada upaya pemecahan masalah:

- a. Pengembangan materi pengajaran Bahasa dan Sastra Sasak, Samawa, dan Mbojo



C. Uji Coba Pembelajaran Materi, dengan kegiatan yang ditujukan pada upaya pemecahan masalah:

- a. Penyusunan Buku Petunjuk Pembelajaran
- b. Penyediaan tenaga pengajar melalui pelatihan;
- c. Pengembangan alat evaluasi;
- d. Uji coba pengajaran

D. Penataan/Perapian GBPP, Materi Pembelajaran, dan Buku Petunjuk Pembelajaran melalui kegiatan Lokakarya, yang diharapkan menjadi hasil akhir kegiatan ini.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai simpulan berikut ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan bahasa daerah/local dari ancaman kepunahan adalah melalui jalur pendidikan formal. Pelindungan bahasa melalui jalur Pendidikan formal dapat ditempuh melalui dua strategi dasar yaitu menjadikan bahasa local/daerah sebagai bahasa pengantar Pendidikan atau sebagai materi pembelajaran muatan local.

Dalam rangka menjadikan bahasa lokal atau bahasa daerah sebagai bahasa pengantar Pendidikan terdapat persoalan konseptual dan metodologis yang dihadapi. Persoalan konseptual menyangkut konsep bahasa, bahasa ibu, dan bahasa daerah. Sebagai akibat dari persoalan konseptual tersebut memunculkan masalah yang terkait metodologis, yaitu menyangkut metode penyediaan guru dan materi pembelajaran.

Kemudian, terkait upaya perlindungan bahasa daerah melalui strategi menjadikan bahasa daerah tersebut sebagai materi muatan local, juga memunculkan masalah konseptual dan metodologis. Masalah konseptual yang muncul terkait dengan parameter apa yang akan digunakan sebagai dasar pengidentifikasi suatu isolek sebagai bahasa atau dialek dari suatu bahasa serta bagaimana relasi kekerabatan di antaranya. Apakah akan digunakan konsep bahasa atau dialek berdasarkan parameter dialektometri, leksikostatistik, atau parameter sosiolinguistik. Pilihan parameter apapun yang dianut akan berakibat pada persoalan metodologis dalam penentuan varian yang menjadi kerangka acuan



berbahasa secara baik dan benar (penentuan ahasa standar) yang menjadi basis pengembangan materi pembelajarannya.

Rujukan

- Alwi, Hasan dan Dendy Soegono. (2000). *Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Bagir Sadar, Al-Allamah Muhammad. (1992). *Pedoman Tafsir Modern: Buku Pegangan Mahasiswa dan Para Peneliti Al-Quran serta Masalah-masalah Keislaman*. Jakarta: Risalah Masa.
- Chair, Abdul dan Leonie Agustina. (2004). *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunarwan, Asim. (2005). "Kasus-kasus Pergeseran Bahasa Daerah Akibat Persaingan dengan Bahasa Indonesia?". Makalah Kongres Linguistik Indonesia, MLI, Padang, 18-21 Juli 2005.
- Jumariam dkk. (2000). *Bibliografi Hasil Kegiatan Penelitian dan Penyusunan Bahasa dan Sastra Daerah dan Melayu*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Krauss, Michael. (1992). *The World's Languages in Crisis*. Dalam *Language*. Vol. 68, I: 4-10.
- Mahsun. 2006. *Distribusi dan Pemetaan Varian-Varian Bahasa Mbojo*. Yogyakarta: Gama Media
- Mahsun. (2007). "Pokok-Pokok Pikiran dalam Pengembangan Kajian Geosastra". Makalah dalam Diskusi terbatas, Kantor Bahasa Provinsi NTB.
- Mahsun. (2008). Beberapa Persoalan dalam Upaya Menjadikan Bahasa Ibu sebagai Bahasa pengantar Pendidikan di Indonesia. Makalah pada Seminar Bahasa Ibu Mei 2008, Sabuga Bandung.
- Mahsun. (2000). "Pengembangan Materi Muatan Lokal yang Berdimensi Kebhinnekatunggalikaan dan Pengajarannya: Penyusunan Bahan pelajaran Bahasa Sasak dengan Memanfaatkan Variasi Bahasa yang Berkerabat. Laporan Penelitian RUT V, Dewan Riset Nasional.
- Mu'adz, M. Husni. (1998). "Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar dan Sebagai Mata Pelajaran dalam Sistem Pendidikan". Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia VII, tanggal 26-30 Oktober 1998, di Jakarta.
- Mutahhari, Murtadha. *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*. Bandung: Mizan.
- Partami, Ni Luh dkk., (1995). *Morfologi Bahasa Kolo*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Poedjosoedarmo, Soepomo. (2003). *Dinamika Bahasa*. Dalam *Dinamika Budaya Lokal dalam Wacana Global*. Yogyakarta: Unit Pengkajian dan Pengembangan Fakultas Budaya, UGM.
- Rachman, Arif. (2006). "UNESCO's Roles in Saving the Endangered Languages and Fostering the Development of Language Education. Makalah pada Seminar Internasional Pemeliharaan Bahasa-bahasa yang Hampir Punah. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rahman, Arif. (2007). "Kepunahan bahasa daerah karena kehadiran BI dan bahasa Inggris serta Upaya Penyelamatannya". Pidato Pengukuhan Guru Besar UNJ, 22 Mei 2007. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wilian, Sudirman. (2006). "Pemertahanan Bahasa dan Pergeseran Identitas Etnis: Kajian Wurm, Stephen A. (2001). *Atlas of the World's Languages in Danger of Disappering*. UNESCO